



## **TRANSFORMASI DIGITAL SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA: ANALISIS LONGITUDINAL DOMAIN SPBE TAHUN 2018-2024**

**Larasati Puspa Martani Sugianto<sup>1\*</sup>,  
Saskia Salmana Dahyar<sup>2</sup>, Vecco Suryahadi Saputro<sup>3</sup>,  
Said Aryonindito<sup>4</sup>, Kamaluddin Rahmat<sup>5</sup>**

Program Studi Akuntansi<sup>1,2,3,4,5</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis<sup>1,2,3,4,5</sup>  
Universitas Padjadjaran<sup>1,2,3,4</sup>,  
Universitas Singaperbangsa Karawang<sup>5</sup>

\*Correspondent Author: [larasati.sugianto@unpad.ac.id](mailto:larasati.sugianto@unpad.ac.id)

Authors Email: [larasati.sugianto@unpad.ac.id](mailto:larasati.sugianto@unpad.ac.id)<sup>1</sup>,  
[saskia.salmana@unpad.ac.id](mailto:saskia.salmana@unpad.ac.id)<sup>2</sup>, [vecco.suryahadi@unpad.ac.id](mailto:vecco.suryahadi@unpad.ac.id)<sup>3</sup>,  
[saidaryonindito@gmail.com](mailto:saidaryonindito@gmail.com)<sup>4</sup>, [kamaluddin.rahmat@fe.unsika.ac.id](mailto:kamaluddin.rahmat@fe.unsika.ac.id)<sup>5</sup>

**Received:** September 27,2025. **Revised:** November 04,2025.

**Accepted:** November 06, 2025. **Issue Period:** Vol.9 No.2 (2025), Pp. 287-300

**Abstrak:** Dalam rangka menuju pemerintah digital, diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi titik awal konvergensi layanan digital antar instansi pemerintah di Indonesia. Sebagai upaya untuk memahami perkembangan indeks SPBE dalam periode 2018-2024, penelitian ini mengevaluasi tingkat pertumbuhan empat domain SPBE yang mencakup Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE. Dilakukan pula analisis untuk mengidentifikasi kesenjangan antar instansi dan antar tingkat pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif berbasis data sekunder dengan teknik *purposive sampling* dalam memilih delapan instansi pemerintah yang terdiri dari empat instansi Kementerian dan empat instansi pemerintah daerah sebagai objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari laporan hasil evaluasi SPBE yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), kemudian dianalisis secara longitudinal. Hasil penelitian mengindikasikan peningkatan signifikan dalam hal tata kelola digital pemerintahan melalui peningkatan capaian indeks SPBE. Secara agregat, dalam periode observasi, indeks SPBE mengalami konvergensi melalui harmonisasi kebijakan, integrasi, dan standarisasi. Namun, analisis domain SPBE menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan kelembagaan sehingga dapat dilakukan pergeseran dari “harmonisasi struktural” menuju “optimalisasi fungsional”.

**Kata kunci:** E-Government, SPBE, Transformasi Birokrasi, Kesenjangan Digital



DOI: 10.52362/jisicom.v9i2.2091

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



**Abstract:** *In order to move towards digital government, the enactment of Presidential Regulation No. 95 of 2018 on the Electronic-Based Government System (SPBE) become the starting point for the convergence of digital service between government agencies in Indonesia. In an effort to understand the development of the SPBE index in 2018-2024, this study evaluates the progression of the four SPBE domains which include Policy, Governance, Management, and Service. An analysis was also performed to identify gaps between different governmental agencies and different levels of governmental agencies. This study employs a comparative descriptive method based on secondary data with purposive sampling technique to select eight governmental agencies consist of four ministries and four local government as research objects. Secondary data were obtained from SPBE evaluation reports published by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (KemenPAN-RB), then analyzed longitudinally. The results of the study indicate a significant improvement in digital governance through an improved SPBE index. In aggregate, during the observation period, SPBE index converged through policy harmonization, integration, and standardization. However, analysis of SPBE domains show that institutional gaps still exist, suggesting a shift from “structural harmonization” to “functional optimization”.*

**Keywords:** *E-Government; SPBE; Bureaucracy Transformation; Digital Divide*

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang sangat cepat tidak hanya memengaruhi sektor swasta, namun juga sektor publik. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sektor publik, khususnya pada domain pemerintahan yang dikenal dengan istilah *e-government* atau pemerintahan digital kini tengah menjadi prioritas kebijakan utama berbagai negara di dunia guna meningkatkan resiliensi dan efisiensi instansi pemerintahan [1]. Berdasarkan kajian literatur terdahulu, pemanfaatan pemerintahan digital dapat meningkatkan kualitas layanan publik [2], meningkatkan kepercayaan publik [3], dan mengurangi biaya administratif [4].

Menyadari manfaat reformasi birokrasi melalui transformasi digital yang sangat signifikan, adopsi pemerintahan digital di Indonesia menghasilkan pengembangan aplikasi sektoral yang sangat masif. Berdasarkan laporan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), tercatat lebih dari 27.000 aplikasi telah dikembangkan oleh berbagai instansi pemerintahan di Indonesia [5]. Di satu sisi, banyaknya jumlah aplikasi yang dikembangkan mencerminkan tingginya komitmen para instansi pemerintahan dalam melakukan digitalisasi. Meski demikian, pengembangan aplikasi yang tidak terintegrasi dapat mengakibatkan inefisiensi dan pemborosan sumber daya. Tanpa interoperabilitas, fragmentasi layanan pemerintahan dapat mengakibatkan sejumlah isu seperti duplikasi data, data yang usang, dan inkonsistensi penyimpanan data [6].

Menanggapi isu fragmentasi layanan pemerintah yang terjadi, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diundangkan sebagai kerangka nasional untuk transformasi digital pemerintahan di Indonesia. Menurut Choirunnisa et al. (2023), implementasi SPBE yang efektif dapat meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik melalui eliminasi hambatan fisik, efisiensi layanan, dan keterbukaan informasi. Sebagai upaya untuk mengukur efektivitas pelaksanaan SPBE, diundangkan pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Selain menjadi alat ukur teknis, Pedoman Evaluasi SPBE juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan pengawas kinerja digital pemerintahan.





Sejumlah kajian terdahulu telah melakukan berbagai analisis untuk memahami peran SPBE [7], hambatan penerapan SPBE [8], dan evaluasi tingkat kematangan beragam instansi pemerintahan [9], [10], [11]. Walau demikian, penelitian tersebut umumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Ditemukan pula keterbatasan riset empiris yang spesifik menganalisis data evaluasi SPBE secara longitudinal dan lintas instansi dari data panel laporan SPBE nasional. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan berikut:

***“Bagaimana perkembangan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada periode 2018-2024?”***

Secara lebih spesifik, penelitian ini dilakukan untuk melihat perbandingan kinerja antara delapan instansi pemerintah guna memahami perbedaan capaian antara Kementerian dan Pemerintah Daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab peningkatan atau penurunan indeks SPBE dalam enam tahun terakhir.

## II. METODE DAN MATERI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder. Sesuai dengan tujuan penelitian, riset ini dilakukan untuk menjelaskan perkembangan implementasi SPBE secara longitudinal serta membandingkan capaian antar instansi pemerintah Indonesia. Khususnya, metode ini dipilih untuk menarik kesimpulan mengenai kesamaan dan perbedaan diantara berbagai kelompok yang telah ditetapkan berdasarkan data empiris [12]. Sumber data penelitian ini menggunakan hasil evaluasi tahunan SPBE nasional yang dipublikasikan oleh KemenPAN-RB dalam rentang waktu 2018 hingga 2024 [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]. Pemilihan periode waktu dalam riset ini didasari oleh justifikasi yang valid, di mana tahun 2018 merupakan titik awal dilaksanakannya evaluasi SPBE, sedangkan tahun 2024 menjadi tahun terakhir di mana data evaluasi SPBE telah diterbitkan oleh KemenPAN-RB. Dengan demikian, rentang waktu yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini dapat memastikan keterbandingan antar sampel secara lengkap dan representatif.

Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel non-probabilitas yang umum digunakan oleh para peneliti dalam riset kualitatif ataupun kuantitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait pola dan dinamika suatu fenomena [20], [21], [22]. Secara metodologis, teknik pengambilan sampel ini relevan untuk digunakan dalam penelitian deskriptif komparatif yang memerlukan kedalaman analisis konteks, dibandingkan dengan generalisasi populasi [23]. Lebih lanjut, teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih instansi pemerintah yang secara spesifik relevan dengan tujuan penelitian ini guna memastikan data yang bermakna untuk membandingkan perkembangan indeks SPBE pada berbagai institusi.

Dalam rangka memperoleh pemahaman terkait implementasi dan perkembangan indeks SPBE dari tahun 2018 hingga 2024, empat instansi kementerian dan empat instansi pemerintah daerah dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memiliki peran strategis yang dapat memengaruhi SPBE secara langsung, sehingga dipilih sebagai empat sampel yang merepresentasikan instansi kementerian. Pada tingkat instansi pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya), dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Pemkab Trenggalek) merepresentasikan beragam daerah dengan skala dan fase implementasi SPBE yang berbeda sehingga dipilih menjadi empat sampel untuk tingkat instansi pemerintah daerah. Pendekatan *purposive*

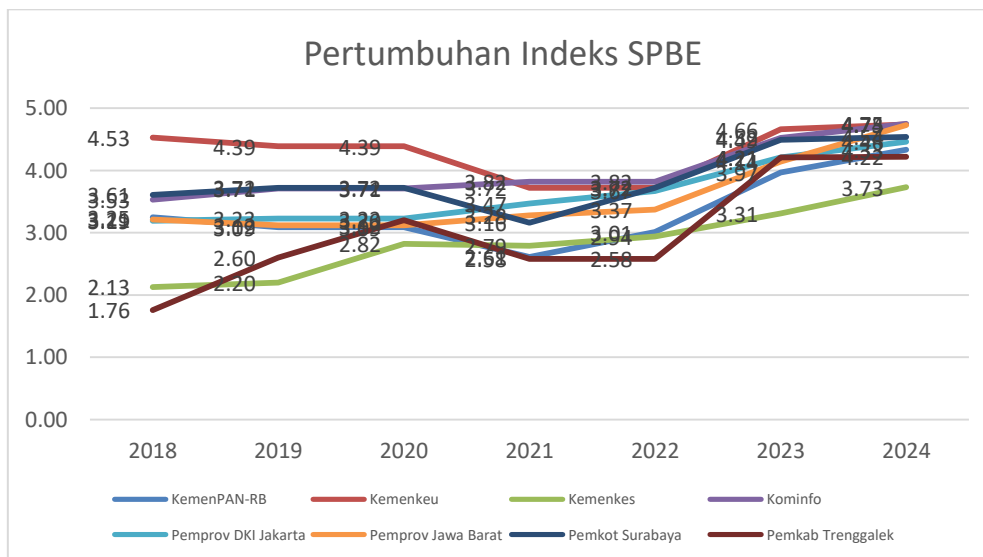


*sampling* ini memastikan bahwa sampel penelitian tidak hanya mencakup lintas instansi, namun juga merepresentasikan variasi geografis, administratif, dan karakteristik yang diperlukan dalam rangka analisis deksriptif komparatif skor indeks SPBE.

### III. PEMBAHASAN DAN HASIL

#### 3.1. Perkembangan Indeks SPBE Tahun 2018-2024

Semenjak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), indeks SPBE delapan lembaga pemerintah yang menjadi objek penelitian ini terus mengalami peningkatan yang relatif konsisten hingga tahun 2024, meski dengan variasi pada beberapa titik waktu tertentu. Mengacu pada Gambar 1 di bawah ini, terlihat bahwa indeks SPBE pada tahun 2018 memiliki variabilitas yang cukup tinggi, dengan rentang skor indeks antara 1,76 hingga 4,53. Perolehan indeks SPBE tertinggi dicapai oleh Kementerian Keuangan dengan skor 4,53 atau predikat “Memuaskan”. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek memperoleh skor terendah dengan capaian indeks SPBE senilai 1,76 atau predikat “Kurang”. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan implementasi SPBE yang cukup tinggi di awal periode pengamatan antara Kementerian Keuangan yang merupakan instansi pada strata Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang merupakan instansi pada strata Pemerintah Daerah.



Gambar 1. Pertumbuhan Indeks SPBE Tahun 2018-2024

Memasuki tahun 2019, terlihat adanya penurunan indeks SPBE pada beberapa instansi pemerintahan, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Melihat data tahun 2020, mayoritas instansi pemerintahan terlihat mengalami stagnasi dengan memperoleh indeks SPBE yang sama persis dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Namun demikian, penurunan indeks SPBE ini bukanlah disebabkan oleh resistensi sejumlah instansi pemerintahan ataupun perubahan metodologi penilaian evaluasi SPBE, melainkan keterbatasan proses evaluasi SPBE di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 sehingga terdapat sejumlah





instansi pemerintah yang tidak melalui proses evaluasi baru dan menggunakan hasil penilaian di tahun sebelumnya [18].

Selanjutnya, data di tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian skor indeks lima dari delapan sampel yang dianalisis mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan rata-rata penurunan senilai 0,47. Berbeda dengan capaian skor di tahun 2020 yang menjadi anomali longitudinal karena tidak sepenuhnya mencerminkan hasil evaluasi riil di tahun tersebut, penurunan indeks SPBE di tahun 2021 disebabkan oleh perubahan metodologi penilaian. Mengacu pada Tabel I, perubahan pada komponen penilaian SPBE tahun 2021 mencakup penambahan domain “Manajemen SPBE”, penyesuaian nomenklatur pada beberapa aspek, dan perubahan bobot masing-masing aspek penilaian.

Tabel I. Domain dan Aspek Penilaian SPBE Tahun 2020-2021

Domain dan Aspek Penilaian Tahun 2020	Bobot Tahun 2020	Domain dan Aspek Penilaian Tahun 2021	Bobot Tahun 2021
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>17%</b>	<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%	Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE	10%	<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>28%</b>	Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE	10%
Aspek 3 - Kelembagaan	8%	Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	8%	Aspek 4 - Penyelenggara SPBE	5%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%	<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>
<b>Domain 3 - Layanan SPBE</b>	<b>55%</b>	Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	33%	Aspek 6 - Pelaksanaan Audit TIK	5%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%	<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>

Pada tahun 2022-2024, terlihat bahwa delapan instansi pemerintahan yang menjadi objek penelitian ini memasuki fase akselerasi kuat, di mana seluruh instansi mengalami lonjakan indeks SPBE yang cukup signifikan. Tingkat pertumbuhan indeks SPBE tertinggi dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan tingkat pertumbuhan senilai 64%, diikuti oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tingkat pertumbuhan senilai 44%, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan peningkatan 40%. Peningkatan indeks SPBE pun terjadi di lima instansi lainnya dengan rentang tingkat pertumbuhan di antara 22% - 27%.

Melihat keseluruhan tren pada Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola konvergensi di mana pada awal tahun 2018 terlihat jarak yang cukup signifikan antar instansi, di mana Pemerintah Kabupaten Trenggalek hanya memperoleh indeks SPBE sebesar 1,76 ketika Kementerian Keuangan telah mencapai skor 4,53. Meski demikian, akhir periode 2024 menunjukkan konvergensi yang mengakibatkan penurunan jarak yang cukup signifikan, yaitu berada pada rentang 3,73 – 4,75.

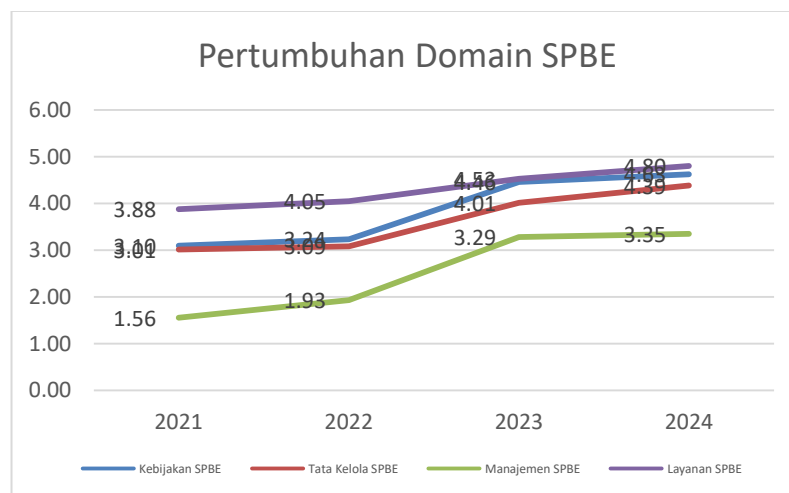
### 3.2. Perkembangan Domain SPBE Tahun 2021-2024

Berbeda dengan analisis perkembangan indeks SPBE yang menjadi pembahasan pada sub bab sebelumnya, analisis atas perkembangan domain SPBE hanya mencakup periode 2021-2024. Keputusan ini didasari oleh justifikasi metodologis dengan mempertimbangkan konsistensi dimensi analisis dan kesetaraan struktur domain. Pada tahun 2018-2020, evaluasi SPBE hanya dilakukan atas tiga domain utama yang mencakup Kebijakan, Tata Kelola, dan Layanan SPBE sedangkan pada tahun 2021-2024 dilakukan penilaian atas empat domain yaitu Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan. Oleh karena itu, meskipun data



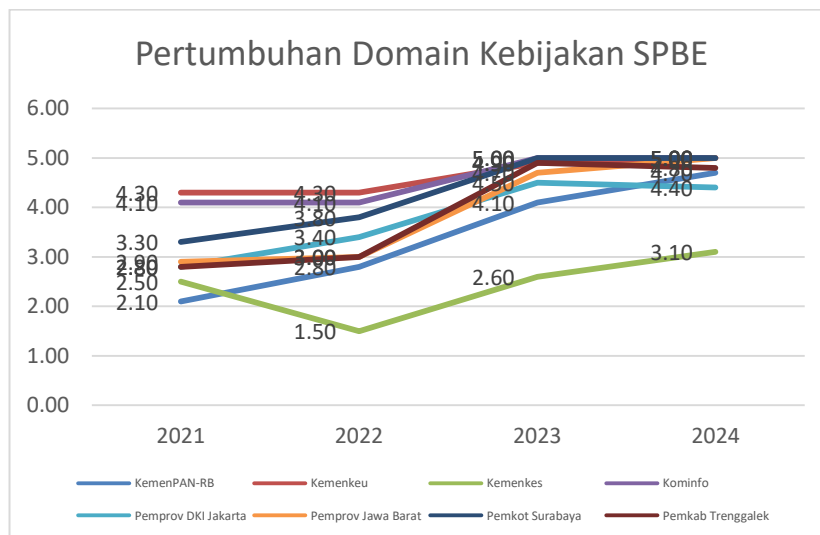
indeks SPBE memang tersedia sejak tahun 2018, analisis domain SPBE hanya dilakukan dalam kurun waktu 2021-2024.

Berdasarkan Gambar 2 di bawah ini, tahun 2021 yang mengawali titik awal observasi bertepatan dengan asal mula dilaksanakannya evaluasi SPBE berdasarkan empat domain utama, yaitu Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Berdasarkan hasil analisis, perkembangan skor masing-masing domain pada empat kementerian dan empat pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini secara konsisten menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data agregat, rata-rata nilai antar domain mengalami peningkatan yang cukup signifikan, semula pada rentang nilai 1,00 – 2,94 di tahun 2021 hingga mencapai rentang nilai 2,82 – 4,13 di tahun 2024, mengindikasikan tren positif dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Meski demikian, ditemukan perbedaan pada pola pertumbuhan antar domain SPBE sebagaimana dijelaskan berikut.



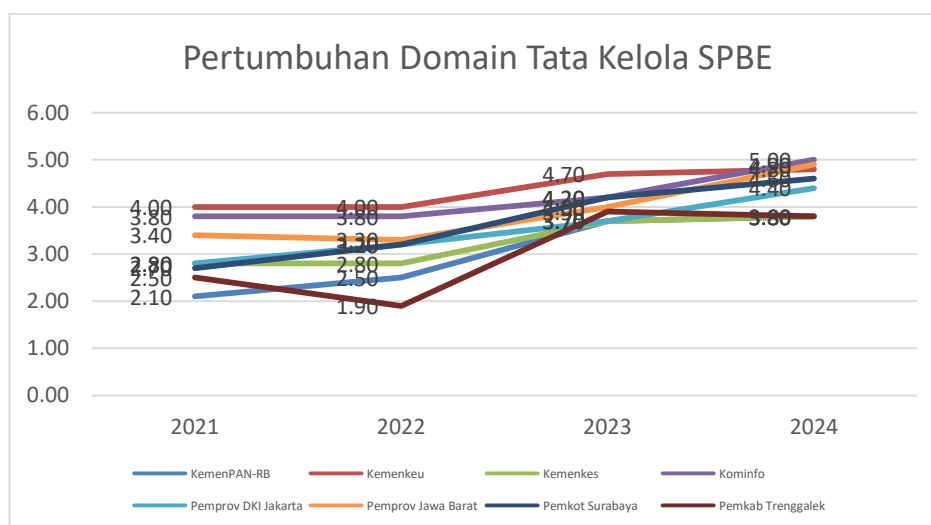
Gambar 2. Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Domain SPBE Tahun 2021-2024

Seperti terlihat pada Gambar 2, domain Kebijakan SPBE mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, dengan rata-rata skor meningkat sekitar 49% dari 3.01 di tahun 2021 menjadi 4.63 di tahun 2024. Temuan ini menegaskan bahwa sebagian besar instansi pemerintah telah membangun landasan regulatif SPBE yang kuat dengan menerbitkan berbagai peraturan internal yang selaras dengan kerangka nasional. Lebih lanjut, temuan ini pun menunjukkan bahwa institusionalisasi SPBE sebagai kebijakan strategis telah berlangsung di sebagian besar instansi.



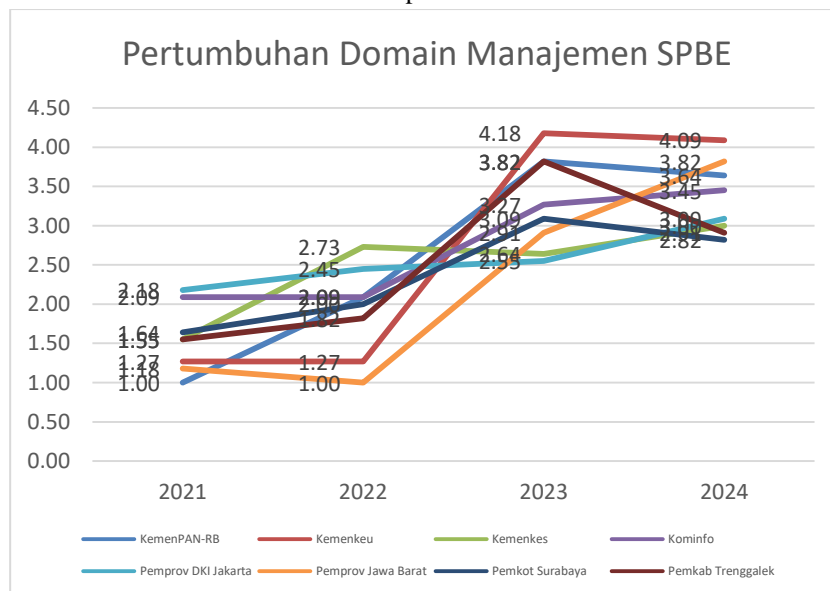
Gambar 3. Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Domain Kebijakan SPBE Tahun 2021-2024

Kominfo dan Pemkot Surabaya menjadi dua dari delapan instansi yang telah memperoleh skor maksimum (5,00) sejak tahun 2023 untuk domain Kebijakan SPBE, diikuti oleh Kemenkeu dan Pemprov Jawa Barat yang juga memperoleh skor 5,00 di tahun 2024. Tercapainya skor maksimum pada domain Kebijakan SPBE dapat diartikan sebagai bukti bahwa empat dari delapan instansi telah memiliki kerangka kebijakan SPBE yang relatif matang dan terstandar sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE nasional. Namun, masih ditemukan disparitas yang cukup mencolok di mana meskipun mengalami peningkatan, skor domain Kebijakan SPBE Kemenkes masih berada di bawah nilai rata-rata nasional dengan tercapainya skor 3,10 di tahun 2024. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan SPBE telah diundangkan sebagai norma regulatif nasional, masih ditemukan variasi sektoral sehingga tingkat kematangan domain kebijakan SPBE belum sepenuhnya mencapai keseragaman.



Gambar 4. Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Domain Tata Kelola SPBE Tahun 2021-2024

Beralih pada domain Tata Kelola SPBE, Gambar 2 mengilustrasikan peningkatan rata-rata skor domain Tata Kelola SPBE sekitar 46% dari 3,01 di tahun 2021 menjadi 4.39 di tahun 2024. Pada Gambar 4, terlihat bahwa peningkatan paling signifikan terjadi pada periode 2022-2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30%. Tren positif pada domain Tata Kelola SPBE mengilustrasikan perbaikan koordinasi lintas unit dan penataan organisasi pengelola SPBE pada berbagai instansi. Secara umum, instansi kementerian cenderung memiliki skor yang lebih tinggi (3,51) dibandingkan dengan instansi pemerintah daerah (3,23) dalam periode 2021-2023. Sebaliknya, terjadi perubahan pada tahun 2024 di mana rata-rata capaian pemerintah daerah (4,43) berhasil melampaui rata-rata capaian instansi kementerian. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya dinamika kebijakan nasional, proses pembelajaran kelembagaan, ataupun perbedaan orientasi kelembagaan antara instansi kementerian dan instansi pemerintah daerah.



Gambar 5. Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Domain Layanan SPBE Tahun 2021-2024

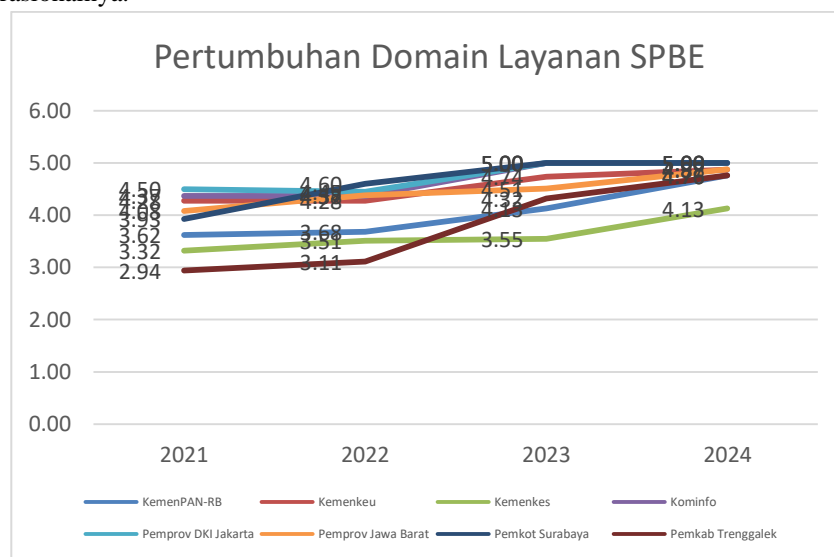
Kembali merujuk Gambar 2, domain Manajemen SPBE memperoleh capaian skor rata-rata yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tiga domain lainnya dalam kurun waktu 2021-2024. Hingga akhir masa observasi, rata-rata domain Manajemen SPBE masih berada di bawah skor 4,00 ketika domain Kebijakan SPBE dan Tata Kelola SPBE telah melampaui skor 4,00. Kondisi ini menandakan bahwa tingkat kematangan domain Manajemen SPBE masih cukup tertinggal jika dibandingkan dengan domain Kebijakan SPBE dan Tata Kelola SPBE. Temuan ini pun mengindikasikan bahwa aspek-aspek dalam domain Manajemen SPBE yang umumnya bersifat operasional seringkali menjadi titik kelemahan dalam transformasi digital birokrasi. Meski demikian, jika dibandingkan dengan ketiga domain lainnya yang mencapai tingkat pertumbuhan dengan rentang 24%-49%, rata-rata skor yang diperoleh domain Manajemen SPBE mengalami lonjakan paling dramatis dengan tingkat pertumbuhan sebesar 115%.

Melihat Gambar 5, domain Manajemen SPBE menjadi domain dengan variabilitas paling signifikan yang disebabkan oleh tingginya disparitas antar instansi pemerintah. Pada tahun 2021, skor domain Manajemen SPBE lintas instansi pemerintah umumnya masih berada pada tahap dasar dengan skor tertinggi senilai 2,18 yang





dicapai oleh Pemprov DKI Jakarta. Secara umum, hal capaian skor ini menunjukkan bahwa mayoritas instansi hanya baru sekedar memiliki rencana atau dokumen Manajemen SPBE namun belum mencapai penerapan terstruktur. Pada titik akhir observasi di tahun 2024, nilai tertinggi diperoleh Kemenkeu dengan skor 4,09. Meskipun temuan ini mengindikasikan peningkatan skor yang cukup tinggi, nilai tertinggi pada domain Manajemen SPBE memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan ketiga domain lainnya yang sudah dapat mencapai skor maksimum (5,00). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa reformasi digital birokrasi Indonesia dalam domain Kebijakan dan Tata Kelola cenderung lebih kuat dibandingkan dengan Manajemen operasionalnya.



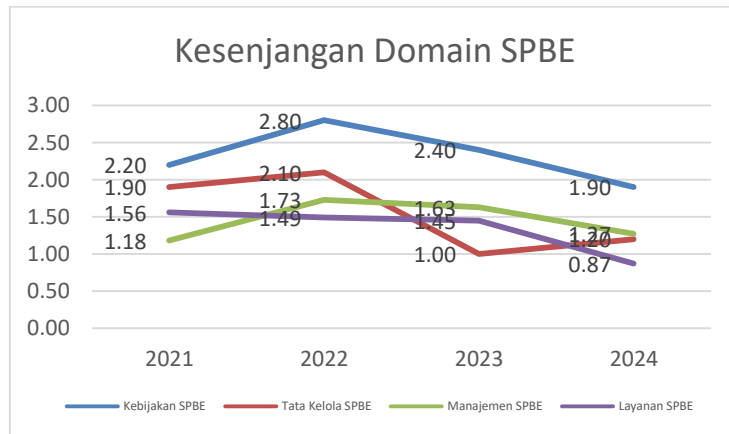
Gambar 6. Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Domain Layanan SPBE Tahun 2021-2024

Sebagai cerminan paling konkret atas kinerja digital pemerintahan, domain Layanan SPBE secara konsisten memperoleh rata-rata nilai domain tertinggi dengan capaian 3,88 di tahun 2021 hingga 4,80 di tahun 2024. Berdasarkan Gambar 6, dalam dua tahun terakhir masa observasi (2023-2024), tiga dari delapan instansi yaitu Kominfo, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemkot Surabaya mampu mempertahankan capaian nilai maksimum (5,00) untuk domain Layanan SPBE. Berbeda dengan domain Manajemen SPBE yang secara agregat masih tertinggal dalam hal tingkat kematangannya, capaian skor pada domain Layanan SPBE mampu mengilustrasikan bahwa perkembangan layanan digital publik dapat tumbuh secara lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan pengelolaan internalnya.

### 3.3. Analisis Kesenjangan Antar Instansi

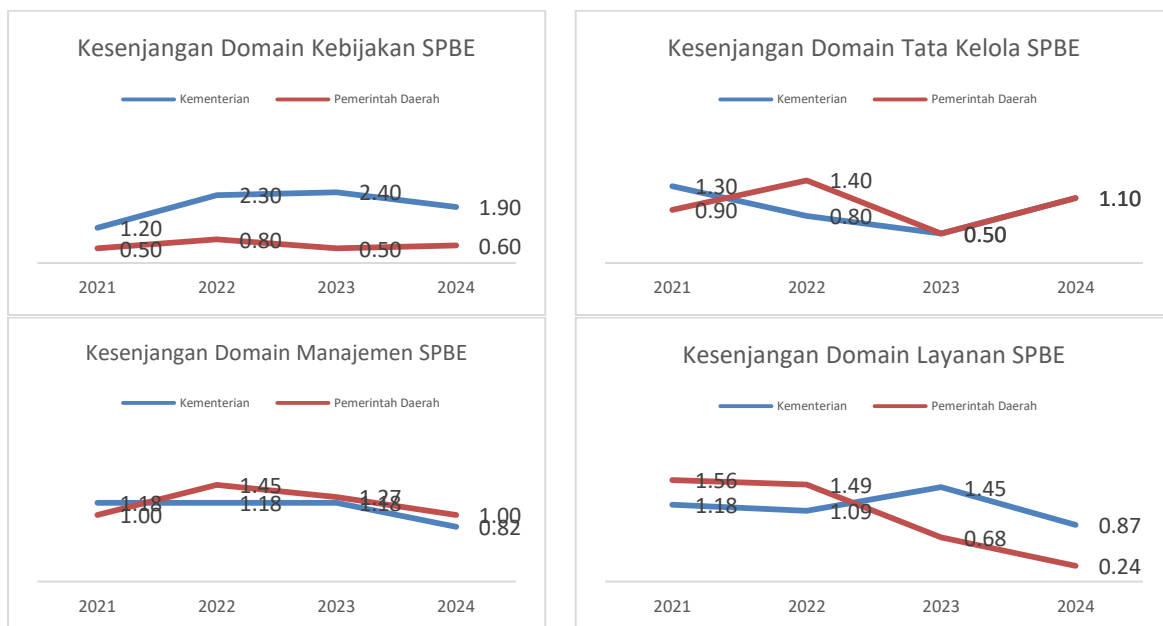
Secara agregat, nilai rata-rata kesenjangan lintas instansi untuk seluruh domain mengalami fluktuasi yang cukup bervariasi dalam periode 2021-2024. Rentang skor rata-rata pada Gambar 7 di bawah ini menyajikan derajat ketimpangan tingkat kematangan keempat domain SPBE, di mana semakin kecil rentang nilai untuk masing-masing domain mengindikasikan keselarasan penerapan SPBE yang semakin tinggi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat penyempitan tren kesenjangan dari tahun ke tahun, namun dengan pola yang berbeda untuk setiap domain.





Gambar 7. Kesenjangan Domain SPBE Tahun 2021-2024

Di antara keempat domain SPBE, terlihat bahwa domain Kebijakan SPBE memiliki tingkat kesenjangan yang paling tinggi, terutama di tahun 2022 dengan jarak mencapai 2,80 poin. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan adaptasi antar instansi pemerintah yang menjadi sampel dalam penelitian ini, dimana sejumlah instansi memerlukan waktu yang lebih lama untuk melakukan penyesuaian pada struktur kebijakan dan dasar hukum internalnya. Dalam kurun waktu 2022-2024, terjadi kesenjangan dalam domain Kebijakan SPBE secara konsisten berkurang hingga mencapai 1,90. Secara lebih spesifik, Gambar 8 menunjukkan bahwa pada domain Kebijakan SPBE, kementerian secara konsisten mengalami kesenjangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintah daerah. Melalui temuan ini, ditemukan asimetri kelembagaan dalam percepatan tingkat kematangan domain Kebijakan SPBE di mana keragaman arah kebijakan antar Kementerian jauh lebih besar dibandingkan dengan antar Pemerintah Daerah.





Gambar 8. Kesenjangan Domain SPBE Tahun 2021-2024

Melanjutkan pembahasan, domain Tata Kelola SPBE mengalami penurunan drastis dari 2,10 di tahun 2022 menjadi 1,00 di tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan bahwa kerangka kerja yang mengatur, mengarahkan dan mengendalikan penerapan SPBE pada berbagai instansi sudah cukup selaras. Menganalisis domain Tata Kelola SPBE secara lebih mendalam, terlihat pada Gambar 8 bahwa tingkat kesenjangan antara Kementerian dan Pemerintah Daerah mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pola ini menunjukkan bahwa baik Kementerian maupun Pemerintah Daerah masih berupaya mengidentifikasi bentuk koordinasi yang paling optimal dalam penerapan SPBE.

Mengalihkan fokus analisis menuju domain Manajemen SPBE, terlihat fluktuasi yang tidak terlalu signifikan, di mana kesenjangan sempat melebar di tahun 2022 hingga mencapai 1,73 poin, kemudian kembali menyempit secara konsisten hingga mencapai 1,27 poin di tahun 2024. Pada konteks yang lebih spesifik sesuai ilustrasi pada Gambar 8, domain Manajemen SPBE menunjukkan kesenjangan antara Kementerian dan Pemerintah Daerah yang paling rendah dibandingkan dengan domain lainnya. Temuan ini mengimplikasikan bahwa baik Kementerian ataupun Pemerintah Daerah mulai mengalami konvergensi dalam proses dan aktivitas penerapan SPBE yang efektif.

Pembahasan terakhir bergeser pada domain Layanan SPBE, yaitu satu-satunya domain yang secara konsisten hanya mengalami penurunan tingkat kesenjangan dalam periode observasi, dengan perolehan 1,56 poin di tahun 2021 menjadi 0,87 di tahun 2024. Kondisi ini menyiratkan bahwa pada tahun 2024, ketersediaan layanan digital antar sampel penelitian relatif setara, meskipun belum dapat dieliminasi sepenuhnya. Lebih lanjut, konvergensi tingkat kematangan domain Layanan SPBE pun tercermin pada Gambar 8, di mana meskipun terlihat sedikit fluktuasi, nilai kesenjangan pada Kementerian (0,87) dan Pemerintah Daerah (0,24) di tahun 2024 mencapai nilai kesenjangan yang cukup minimal.

Melalui analisis yang lebih mendalam, terlihat bahwa dari perspektif longitudinal, tingkat konvergensi Pemerintah Daerah melampaui Kementerian. Pernyataan ini dibuktikan oleh tingkat kesenjangan pada tingkat Kementerian (1,18) yang lebih rendah dibandingkan Pemerintah Daerah (1,56) di tahun 2021 terbalik menjadi tingkat Kementerian (0,87) yang lebih tinggi dibandingkan Pemerintah Daerah (0,24) di tahun 2024. Diantara sejumlah faktor yang ada, faktor utama yang dapat mengakibatkan fenomena ini adalah skala koordinasi daerah yang lebih kecil sehingga memungkinkan harmonisasi yang lebih cepat dibandingkan Kementerian yang memiliki struktur birokrasi lebih kompleks.

#### IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian deskriptif komparatif ini menyajikan perkembangan SPBE di Indonesia dalam kurun waktu 2018 hingga 2024, dilengkapi dengan analisis domain dan kesenjangan dari tahun 2021-2024. Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa Indeks SPBE seluruh sampel secara agregat mengalami peningkatan sejak diselenggarakannya evaluasi SPBE yang pertama di tahun 2018. Peningkatan indeks SPBE secara agregat juga mengindikasikan terjadinya penguatan kapasitas digital birokrasi dan keberhasilan kebijakan standarisasi pada tingkat Pemerintah Daerah dan juga Kementerian. Lebih lanjut, temuan pada penelitian ini pun mengilustrasikan kemajuan progresif secara agregat, meski belum sepenuhnya merata antar instansi dan antar tingkat pemerintahan. Meski demikian, observasi agregat atas kurun waktu 2018-2024 menunjukkan bahwa peningkatan yang signifikan terjadi pada periode 2019-2020 sebagai titik awal pembangunan fondasi penerapan SPBE. Dalam periode 2021-2022, indeks SPBE secara agregat mengalami penurunan akibat anomali





longitudinal dan perubahan metodologi evaluasi SPBE. Pada tahun 2022-2023, terjadi lonjakan kembali yang cukup signifikan hingga laju pertumbuhannya cenderung mulai stabil di tahun 2023-2024. Dengan demikian, periode 2023-2024 dapat disimpulkan sebagai fase konsolidasi di mana struktur regulasi dan kelembagaan sampel penelitian telah cukup mapan meskipun belum antar instansi belum mencapai titik keseragaman.

Berdasarkan analisis domain, ditemukan bahwa tingkat pertumbuhan skor domain SPBE secara agregat maupun lintas tingkat instansi pemerintah belum sepenuhnya konvergen, dalam artian masih ditemukan kesenjangan. Analisis kesenjangan menandakan bahwa meskipun terdapat variasi, ditemukan pola dalam masa observasi berupa penurunan disparitas menuju keseragaman dengan capaian konvergensi tertinggi pada domain Layanan SPBE dan terendah pada domain Kebijakan SPBE. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan SPBE di Indonesia sedang berada dalam tahap konvergensi melalui penurunan kesenjangan kelembagaan dan peningkatan tata kelola digital nasional. Meski transformasi digital pemerintahan dapat mendorong konvergensi penyelenggaraan SPBE, masih diperlukan penguatan inovasi, interoperabilitas, dan orientasi hasil untuk mendukung SPBE sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien, inklusif, dan berorientasi nilai publik digital.

#### REFERENSI

- [1] UN Desa, "E-Government Survey 2024: Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development With the addendum on Artificial Intelligence," 2024. [Online]. Available: <https://publicadministration.un.org/en/>
- [2] A. Osei-Kojo, "E-government and public service quality in Ghana," *J Public Aff*, vol. 17, no. 3, Aug. 2017, doi: 10.1002/pa.1620.
- [3] A. Jameel, M. Asif, A. Hussain, J. Hwang, N. Sahito, and M. H. Bukhari, "Assessing the moderating effect of corruption on the e-government and trust relationship: An evidence of an emerging economy," *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, no. 23, Dec. 2019, doi: 10.3390/su11236540.
- [4] L. A. Muñoz, A. M. L. Hernández, and M. P. R. Bolívar, "E-Inclusion Strategies in Public Administrations," 2014, pp. 73–93. doi: 10.4018/978-1-4666-5868-4.ch006.
- [5] KemenPAN-RB, "Dorong Efisiensi dan Keterpaduan Aplikasi dengan Proses Clearance." Accessed: Sep. 28, 2025. [Online]. Available: [https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dorong-efisiensi-dan-keterpaduan-aplikasi-dengan-proses-clearance?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dorong-efisiensi-dan-keterpaduan-aplikasi-dengan-proses-clearance?utm_source=chatgpt.com)
- [6] S. S. Paradkar, "eGovernment Integration Framework for Fragmented Systems," *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, vol. 9, no. 1, pp. 51–55, Jan. 2021, doi: 10.26438/ijcse/v9i1.5155.





- [7] L. Choirunnisa *et al.*, “Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia,” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, vol. 3, no. 1, May 2023.
- [8] A. Arief and M. Y. Abbas, “Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” 2021.
- [9] H. D. Pratiwi, W. Hayuhardhika, N. Putra, and A. D. Herlambang, “Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” 2020. [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- [10] N. Abda Taqiya, S. Mukaromah, and A. Pratama, “Analisis Tingkat Kematangan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur,” *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, vol. XV, Feb. 2020.
- [11] F. Arga Wahyudi and N. Eka Putri, “Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sijunjung,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, vol. 06, 2024, doi: 10.47134/villages.v6i1.
- [12] F. Esser and R. Vliegthart, “Comparative Research Methods,” in *The International Encyclopedia of Communication Research Methods*, Wiley, 2017, pp. 1–22. doi: 10.1002/9781118901731.iecrm0035.
- [13] KemenPAN-RB, “Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022,” 2022. [Online]. Available: <https://menpan.go.id/>
- [14] KemenPAN-RB, “Laporan Evaluasi SPBE Tahun 2024,” 2024.
- [15] KemenPAN-RB, “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SPBE Tahun 2019,” 2019.
- [16] KemenPAN-RB, “Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2021,” 2021.
- [17] KemenPAN-RB, “Laporan Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2023,” 2023.
- [18] KemenPAN-RB, “Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi SPBE Tahun 2020,” 2020.
- [19] KemenPAN-RB, “Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018,” 2018.
- [20] F. Nyimbili and L. Nyimbili, “Types of Purposive Sampling Techniques with Their Examples and Application in Qualitative Research Studies,” *British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies*, vol. 5, no. 1, pp. 90–99, Feb. 2024, doi: 10.37745/bjmas.2022.0419.





e-ISSN : 2597-3673 (Online) , p-ISSN : 2579-5201 (Printed)

Vol.9 No.2 (December 2025)

**Journal of Information System, Informatics and Computing**

Website/URL: <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisicom>

Email: [jisicom@stmikjayakarta.ac.id](mailto:jisicom@stmikjayakarta.ac.id) , [jisicom2017@gmail.com](mailto:jisicom2017@gmail.com)

---

- [21] I. Etikan, "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, vol. 5, no. 1, p. 1, 2016, doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11.
- [22] M. A. Memon, R. Thurasamy, H. Ting, and J. H. Cheah, "Purposive Sampling: A Review and Guidelines for Quantitative Research," *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, vol. 9, no. 1, pp. 1–23, 2025, doi: 10.47263/JASEM.9(1)01.
- [23] S. Campbell *et al.*, "Purposive sampling: complex or simple? Research case examples," *Journal of Research in Nursing*, vol. 25, no. 8, pp. 652–661, Dec. 2020, doi: 10.1177/1744987120927206.



DOI: 10.52362/jisicom.v9i2.2091

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).